

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA****Pengelolaan Risiko Pengembangan Desa *Broadband* di Indonesia**

Puslitbang Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
puslitbang.sdppi@kominfo.go.id

2016***Abstrak***

Untuk meningkatkan kesuksesan pelaksanaan Pengembangan Desa *Broadband* Terpadu di Indonesia, pengamatan terhadap aspek penting penyelenggaraan telah dilakukan di 13 lokasi penerima program. Pengamatan pada tiap komponen sistem penyelenggaraan (infrastruktur, layanan dan konten, kesiapan fasilitas pendukung, kehandalan tata kelola dan aturan, kesiapan koordinasi dan informasi, serta ketersediaan jejaring keahlian) difokuskan dengan mempelajari tingkat risiko yang dapat bermuara pada kegagalan program. Identifikasi risiko menghasilkan rekomendasi apakah model penyelenggaraan yang sedang diujicobakan di 50 lokasi seyogyanya dilanjutkan atau dihentikan. Beberapa saran pengelolaan risiko dihasilkan untuk meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dan pemanfaatannya, berupa peningkatan kualitas implementasi dan desain ulang program secara menyeluruh. Strategi yang disarankan adalah pengelolaan dan pembiayaan risiko agar menghindari sumber risiko dan mengurangi konsekuensi risiko yang ada. Sedangkan, model-model mitigasi yang diusulkan secara umum mencakup dua pendekatan, yaitu *socio-entrepreneur* untuk keberlangsungan penyediaan, dan penerapan pemberdayaan organik untuk keberlangsungan pemanfaatan. Kata Kunci – *mitigasi, risiko, penyediaan, pemanfaatan, desa broadband*

Latar Belakang

Program Desa *Broadband* Terpadu adalah sebuah program yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa penggelaran infrastruktur dan fasilitas akses pita lebar yang minimal di desa-desa 3T (Tertinggal, Terpencil, Terjauh), namun dilengkapi dengan penyiapan pemanfaatannya, antara lain dengan pelatihan SDM, untuk menggerakkan potensi ekonomi desa yang ada. Sebagai konsekuensi bagi sebuah program yang ditujukan bagi terciptanya transformasi di wilayah perdesaan, dalam pelaksanaannya harus dapat mengintegrasikan berbagai sistem yang bersifat kompleks, agar tidak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan program.

Diawali dengan uji coba penerapan di 50 desa, program ini direncanakan untuk direplikasi pada 100 desa lainnya. Sebelum mewujudkan hal tersebut, pengambil kebijakan masih memerlukan informasi berupa indikasi risiko yang berpengaruh terhadap tingkat pencapaian tujuan program dan antisipasi untuk pengelolaannya, sebagai dasar dalam menentukan kebijakan perencanaan, mengingat terdapat variasi yang sangat besar atas kondisi desa-desa di Indonesia. Untuk menyediakan informasi tersebut, yang bermanfaat bagi masyarakat, operator, dan pemerintah, dalam rangka meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dan harus ditanggung, maka dilaksanakan kajian “Pengelolaan Risiko Pengembangan Desa *Broadband* di Indonesia”, yang menasar pada perumusan rekomendasi pelanjutan atau penghentian model penyelenggaraan program Desa *Broadband* Terpadu.

Hasil Penelitian

Melalui pengamatan terhadap relasi antar aspek-aspek penting penyelenggaraan program Desa *Broadband* Terpadu, yakni antara 1) infrastruktur, 2) layanan dan konten, 3) kesiapan fasilitas pendukung, 4) kehandalan tata kelola dan aturan, 5) kesiapan koordinasi dan informasi, serta 6) ketersediaan jejaring keahlian, di 13 sampel lokasi penerima program yang tersebar di wilayah barat maupun timur Indonesia, terpetakan sebanyak 8 dari 13 lokasi

sampel memiliki risiko tinggi untuk kegagalan, dan sebanyak 9 dari 15 relasi antar aspek-aspek penting penyelenggaraan memiliki tingkat risiko kegagalan yang tinggi.

Peta ini menunjukkan argumentasi perlunya perbaikan program, dengan kata lain bahwa, apabila model penyelenggaraan Desa *Broadband* Terpadu yang sedang diujicobakan di 50 lokasi tersebut akan direplikasi di tempat lain, maka harus dilakukan perbaikan secara komprehensif terlebih dahulu terhadap model penyelenggaraan tersebut.

Dari hasil analisis atas peta data, perbaikan program dapat dilakukan dengan: 1) memahami kebutuhan khusus di lokasi, seperti terjadi pada lokasi sampel di Batam, Kupang, dan Maluku Tenggara Barat, 2) mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan suatu desa relatif mudah beradaptasi dengan program Desa *Broadband* Terpadu, seperti terjadi pada lokasi sampel di Kepulauan Meranti, Bintan, Malaka, Merauke, dan Belu, dan 3) memperkecil risiko kegagalan pada aspek-aspek: kesiapan regulasi, sistem informasi dan koordinasi, dan sistem keahlian.

Untuk mengelola risiko, telah disusun pula rencana aksi dan rencana implementasi mitigasi untuk keberlangsungan penyediaan dan keberlangsungan pemanfaatan layanan Desa *Broadband* Terpadu, yang memuat opsi-opsi untuk mengendalikan risiko (penghindaran dari sumber risiko, pengendalian kerugian) dan strategi pembiayaan risiko (penekanan risiko, pemindahan risiko, asuransi).

Simpulan dan Rekomendasi bagi Kebijakan dan Regulasi

Di beberapa desa yang memiliki risiko kegagalan rendah, model penyelenggaraan *existing* dapat diteruskan. Di desa lain yang memiliki risiko kegagalan tinggi, diperlukan perbaikan komprehensif terhadap model penyelenggaraan program apabila ingin dilanjutkan, atau, sebaiknya dihentikan bila tanpa perbaikan. Hasil kajian menunjukkan tingkat risiko tinggi ditemukan di 48,4% lokasi, khususnya di wilayah pedalaman (15%) dan wilayah pertanian di kepulauan (33,3%) yang juga terdapat mata pencaharian nelayan. Daerah dominan pertanian memiliki tingkat risiko yang lebih rendah.

Untuk replikasi terhadap 100 desa berikutnya, harus difokuskan pengelolaan risiko pada: 1) penjaminan penyediaan aspek perangkat, jaringan layanan, dan infrastruktur pendukung, yang ditunjang oleh SDM, peraturan pelaksanaan, dan sistem informasi yang memadai, dan 2) penumbuhan kelompok pemanfaat, baik untuk kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi produktif masyarakat dalam berbagai sektor, seperti pertanian, nelayan, dan industri kecil.

Selain itu, untuk mencegah timbulnya sumber pencetus risiko, maka dapat dilakukan dua langkah sebagai berikut: 1) pematangan pasar dengan pendekatan *socio-entrepreneur* perdesaan: dengan melakukan kerja sama dengan operator/ISP untuk menjadi penyedia solusi total Desa *Broadband*, yang didukung oleh mitra lokal penyedia layanan pendukung, dan 2) penerapan model pemberdayaan organik untuk organ desa, institusi, dan komunitas lokal yang ada, dengan dukungan kapasitas organisasi dan staf yang handal serta sistem tata kelola komprehensif dan pengelolaan keuangan yang efektif, dengan dukungan awal Dana USO, dan dilanjutkan dengan dukungan Dana Desa.